

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, K., & Hidayat, D. (2021). EFFECT OF SHARING FUNDS (DBH) FOR REGIONAL BUDGET INCOME (APBD) PRODUCING REGIONS (STUDIES IN INDONESIA UPSTREAM OIL AND GAS INDUSTRY). *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*, 2(3), 484-501.
- Asmawati, A., Saragih, A., Panjaitan, N. J., & Kumala, C. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Pematangsiantar. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 3(2), 339-349.
- Badudu, J.S. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Bali Pustaka: Jakarta.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019) Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Edward J. Blocher (2021), *Manajemen Biaya*, Salemba Empat, Jakarta.
- Fahrina, A. N., & Amalia, F. A. (2024). Pengaruh Tata Kelola Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 13(1), 43-53.
- Fajriati, M, Zulfatunnisa & dkk. (2021) Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Wacana Publik*, 15(2), 75-85.
- Fransiska Xaverius Sadikin. (2021). *Tip dan Trik Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, dan Profitabilitas*, ANDI, Yogyakarta,
- Handaka, D, R. (2017) Analisis Peranan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Sebagai Pendanaan Desentralisasi, *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(2), 27-35.
- Ibnu Syamsi (2019). *Sistem dan Prosedur Kerja*. Bumi Aksara, Jakarta
- Kepala Sub Bidang Anggaran 1, BPKAD Kabupaten Bengkalis, diwawancarai di kantor BPKAD Pada (09 Desember 2024)
- Lubis, A.K. (2024) Aktualisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Ditinjau dari Prinsip Desentralisasi, *Jurnal Hukum Negara & Hukum Administrasi Negara*, 3(1), 315-326.

- Maabuat, E.E, Sutiyo & dkk. (2022) Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(2), 133-144.
- Mubyarto dan Edy Suandi Hamid. (2019), *Meningkatkan Efisiensi Nasional*, BPFE, Yogyakarta.
- Olivia, D. (2020) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dalam Kerangka Penyelenggaraan Desentralisasi, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 85-93.
- Provinsi Riau. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rahman, F.R. (2022) *Analisis atas Pendapatan Daerah Provinsi Riau pada Sektor Migas*, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang selatan.
- RDH, Koesoemahatmadja. (1979) *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah & Dana Desa*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Nomor 2019*.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Perubahan keempat atas PMK Nomor 139 Tahun 2019 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus*.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah*.
- Sagoe, D.C. (2020) Desentralisasi untuk Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik di Negara-negara Berkembang, *Jurnal Ekonomi & Keuangan*, 1-13.
- Safitri, R., & Sopiana, Y. (2023). Analisis Kontribusi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara terhadap Dana Perimbangan, Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Kabupaten Penghasil Minerba yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020). *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 6(2), 824-835.
- Septiawati, A, Sari, Y & dkk.(2021) Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Belanja Langsung Dengan Variabel Pemoderasi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5(2), 279-294.
- Soerjono Soekanto. (2022). *Metodologi Reseach jilid 1*. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Soerjono dan Djoenaesih (2021), *Istilah komunikasi*. Liberty : Yogyakarta.
- Trisnani, S. A., & Isthika, W. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 26-36.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyono, S., Rustam, B. R., Panjaitan, H. P., Andi, A., & Akri, P. (2019). KAJIAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROPINSI RIAU. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*, 4(2), 143-157.